



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**LAKIP TAHUN 2019 TERHADAP
PENILAIAN KINERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2018**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2018 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko. Hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko ini diharapkan dapat digunakan dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama tahun 2018. Disamping itu, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana bagi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders sesuai Peraturan Menpan dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai sarana evaluasi mandiri (self evaluation) atas pencapaian Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dalam upaya penyempurnaan kinerja, terutamat dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun mendatang. Kami berharap penyusunan LAKIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja.

Kami berharap penyusunan LAKIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Mukomuko, Januari 2019
KEPALA DINAS,



HERLIAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196108071985031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PANDAHULUAN	2
A Latar Belakang	2
B Gambaran Pelayanan Dinas Sosial	3
1.1 Kondisi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	3
1.2 Kondisi Umum Bantuan dan Jaminan Sosial	5
1.3 Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial	7
C Maksud dan Tujuan	9
D Gambaran Umum	9
1.1 Organisasi Perangkat Daerah	9
1.2 Sumber Daya Manusia	10
1.3 Sumber Daya Aparatur	11
1.4 Sumber Pendanaan dan Struktur Belanja	11
1.5 Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A Rencana Strategis	13
1 Visi dan Misi	13
2 Tujuan dan Sasaran Strategis	14
3 Program Utama dan Kegiatan Pokok	15
4 Indikator Kinerja Utama	16
B Penetapan Kinerja Tahun 2018	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A Pengukuran Kinerja	17
B Hasil Pengukuran Kinerja	18
C Akuntabilitas Keuangan	18
D Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi ...	19
BAB IV PENUTUP	22
A Beberapa Catatan atas Kinerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2018	22
B Upaya Pemecahan Masalah	23

DAFTAR TABEL

1.	TABEL. 1	Struktur Organisasi Dinas Sosial	1
2.	TABEL. 2	Profil Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Tahun 2018 Berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan.....	2
3.	TABEL. 3	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon	3
4.	TABEL. 4	Struktur Anggaran Dinas Sosial Tahun 2018	4
5.	TABEL. 5	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2018	5
6.	TABEL. 6	Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Tahun 2018	6
7.	TABEL. 7	Evaluasi Analisis Kinerja Tahun 2018	11
8.	TABEL. 8	Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung	19
9.	TABEL. 9	Pagu Realisasi Belanja Langsung	20

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 10) yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (hasil pelaksanaan kegiatan di bidang sosial) dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ).

Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang sosial;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Berikut ini adalah gambaran kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.1 Kondisi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah PMKS yang masuk ke dalam kategori:

a) Pelayanan Sosial Anak

Anak meliputi balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus).

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan Dinas Sosial melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial anak untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua / keluarga.

b) *Pelayanan Sosial Lanjut Usia*

Berbagai program dan kegiatan terus dikembangkan oleh Dinas Sosial dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pralanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin di dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Dengan demikian, aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya mereka.

Secara garis besar, pelayanan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui dua sistem pelayanan sosial yaitu pelayanan melalui sistem panti sosial dan pelayanan melalui sistem luar panti sosial.

c) *Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat*

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- b) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan bagi penyandang cacat;
- c) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan bagi penyandang cacat berat sesuai kriteria melalui sistem jaminan sosial;
- d) Meningkatkan aksesibilitas fisik penyandang cacat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial, dan sumber daya ekonomi untuk

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya.

- e) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik penyandang cacat dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang cacat.

d) **Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban**
Penyalahgunaan Napza

Pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan dalam rangka pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra - dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia.

1.2. Kondisi Umum Bantuan dan Jaminan Sosial

Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya. Untuk memberikan perlindungan kepada kelompok berisiko dan rentan tersebut, diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang bantuan dan jaminan sosial.

a) Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Kabupaten Mukomuko memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi karena letak geografis Kabupaten Mukomuko.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penanggulangan bencana alam yang merupakan upaya kemanusiaan diberikan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan untuk meminimalisasi jumlah korban dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru. Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Sosial mempunyai tanggung jawab di bidang penanggulangan korban bencana alam secara fungsional, baik terhadap perorangan maupun kelompok masyarakat, dengan Membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu :

- (1) Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana;
- (2) Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial;
- (3) Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun

- nonfisik melalui bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban bencana; dan
- (4) Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Mukomuko.

1.3. Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah :

a) *Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin*

Sasaran kegiatan program pemberdayaan fakir miskin diarahkan pada : (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/pertanian, perkotaan, pesisir/pantai, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam, korban bencana sosial, terkena pemutusan hubungan kerja, dan

masalah lainnya yang menyebabkan berkurangnya penghasilan keluarga

Kegiatan Pemberdayaan Paksi Miskin meliputi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) tidak mengakibatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada Paksi miskin dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

b) *Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.*

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), ada beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (*orson*), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP. Komponen kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat

- (1) Pemantapan Program Pemberdayaan Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM
- (2) Orientasi dan Seleksi Karang Taruna, Orson & PSM Berprestasi
- (3) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial
- (4) Penguatan Jaringan Kerja Orson Melalui UEP

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra

dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) adalah untuk mewujudkan akuntabilitas dan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyampaian Laporan Kinerja (LKJ) dimaksudkan untuk memberikan:

1. Pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko kepada pemberi mandat/amanah.
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam perencanaan selanjutnya dan Umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.
3. Meningkatkan akuntabilitas.
4. Mengetahui dan menilai keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

D. GAMBARAN UMUM

1.1. Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 10) dan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 37 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko terdiri :

2.1.1. **Kepala Dinas**

2.1.2. **Sekretariat**, terdiri dari :

2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.1.2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2.1.3. **Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial** terdiri dari :

2.1.3.1. Seksi Rehabilitasi Sosial

2.1.3.2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

2.1.3.3. Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana

2.1.4. **Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin** terdiri dari :

2.1.4.1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

2.1.4.2. Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan

2.1.4.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial

1.2 **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia ini berkaitan dengan jumlah personil/ karyawan yang ada di Dinas Sosial pada tahun 2018. Jumlah karyawan yang ada saat ini dirasakan masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama untuk mendukung kebijakan, program dan kegiatan yang memerlukan mobilitas dan akselerasi tinggi, baik yang bersifat konseptual maupun urusan teknis. Gambaran profil Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial terlihat seperti pada **Tabel. 2**

1.3 Sumber Daya Aparatur

Pada tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial dapat dikatakan kurang baik dalam segi jumlah maupun pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah yang menduduki eselon 12 orang sedang jumlah staf yang berstatus PNS berjumlah 8 orang sehingga tidak semua pejabat struktural memiliki seorang staf, namun demikian untuk mengatasi kekurangan tersebut Dinas Sosial mencari alternatif dengan mengangkat Tenaga Kontrak sejumlah 9 (Sembilan) orang dan untuk peningkatan kemampuan operasional akan dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur. Maka pada Dinas Sosial terdapat 4 (Empat) eselon yaitu Eselon II-B, III-A, III-B dan IV-A hal ini sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 10) dan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 37 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada **Tabel 3**

1.4 Sumber Pendanaan dan Struktur Belanja

Pada tahun 2018, Dinas Sosial mendapatkan alokasi dana/anggaran senilai **Rp.4.384.075.000,00** meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Struktur Anggaran Dinas Sosial Tahun 2018 seperti terlihat pada **Tabel 4**

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam Tahun Anggaran 2018, dengan bentuk sajian seperti berikut:

Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Dinas Sosial dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain;

- a. Latar Belakang;
- b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
- c. Struktur Organisasi. Sumber Pendanaan dan Struktur Belanja;
- d. Sistematika Penyajian.

Bab II. Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Dinas Sosial dalam tahun anggaran 2018, meliputi

- a. Rencana Strategis; dan
- b. Penetapan Kinerja

Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Dinas Sosial, meliputi:

- a. Pengukuran Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV. Penutup, menguraikan

- a. Catatan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP)
- b. Upaya pemecahan masalah untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tahun 2018 adalah Tahun Pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial periode 2018-2021. Tahun ini merupakan bagian penting untuk menjalankan target-target yang termasuk dalam Renstra itu untuk dapat diwujudkan. Sehingga Renstra sebagai acuan untuk tahun ke tahun dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi dapat direalisasikan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan.

1. Visi dan Misi

Visi atau *vision* adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Visi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2018-2021 adalah ***“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Mukomuko”***

Dalam upaya mewujudkan visi di atas, telah dirumuskan beberapa misi yang merupakan penjabaran yang lebih detail dari visi. Misi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, Pelayanan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
- b. Mengembangkan Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
- c. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan jaminan sosial sebagai metode penanggulangan kemiskinan;
- d. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- f. Mengembangkan potensi sumber daya kawasan dan melaksanakan perpindahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan perkembangan pemukiman transmigrasi yang berwawasan lingkungan;
- g. Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah;
- h. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi;
- i. Mendorong perluasan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja;
- j. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat; dan
- k. Mewujudkan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan dan menciptakan suasana nyaman dan produktif.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, pemecahan masalah (*problem solving*) dan upaya untuk merespon dan menangani isu-isu daerah yang aktual. Tujuan juga dapat dipahami sebagai implementasi dari pernyataan visi, dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai oleh organisasi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang target pencapaiannya ditentukan setiap tahun. Penetapan secara akurat, terukur dan komprehensif tujuan dan sasaran pada akhirnya akan mempermudah pencapaian visi dan misi SKPD. Tentu muara dari semua itu adalah tercapainya visi dan misi daerah yang merupakan formula dari visi dan misi kepala daerah yang disusun dengan berlandaskan dan mengacu pada RPJPD Daerah, RPJPD Provinsi

maupun RPJPN. Gambaran mengenai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel.5**

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 perlu dirumuskan program-program yang relevan. Program-program utama itu adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
- d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- h. Program Peningkatan Penanggulangan NAPZA, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS

Dalam upaya untuk mendukung realisasi program-program utama ditetapkan beberapa kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan bidang-bidang. Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dan keuangan berorientasi pada upaya penguatan internal dan eksternal SKPD, baik dari sisi administratif maupun kinerja aparatur secara keseluruhan. Kegiatan yang mendukung fungsi bidang sosial itu berorientasi pada pelayanan, perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) PMKS/PSKS, baik yang fokus pada seting mikro, mezzo maupun makro.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018 diuraikan secara lengkap dalam **Tabel.6**

B. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Rencana Target Kinerja tahun 2018 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam **Tabel.7**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *input*, *outputs*, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*. Menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, mengitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara idealitas dan realitas. Artinya perbandingan itu dilihat dari target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X > 85$	: Sangat Berhasil
$70 < X < 85$	: Berhasil
$55 < X < 70$	: Cukup Berhasil
$X < 55$	: Tidak Berhasil

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih difokuskan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun *stakeholder* lainnya. Tentu dalam prosesnya indikator kinerja yang digunakan akan ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2018. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Hasil pengukuran kinerja secara rinci dan lengkap diuraikan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LAKIP Dinas Sosial Tahun 2018.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.

Pada tahun 2018 belanja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya

dan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 4). Gambaran anggaran Dinas Sosial tahun 2018 dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung diuraikan pada **Tabel 8 dan 9**.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung atau sering dikenal dengan belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menganggarkan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 1.349,093,000,00-** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 1.339.842.502,00-** atau **99,31 %** yang secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 8**

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Pada Tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menganggarkan belanja langsung sebesar **Rp. 3.034.039.000,00-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.877.331.492,00-** atau **99,81 %** Gambaran secara rinci terkait penganggaran dan realisasi belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko per-program dan per-kegiatan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada **Tabel 9**

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan
3. Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya - upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya
3. mengoptimalkan kualitas pelayanan dan meningkatkan koordinasi pada berbagai sektor dan level serta mencari dukungan program / kegiatan dari pemerintah Provinsi dan Pusat

Selain hal tersebut diatas perlunya rentang kendali terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan yang efektif, inovatif, adaptif. Sinergi implementasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, serta rentang kendali pelaksanaan tugas dari setiap level jabatan untuk memastikan sistem dan prosedur pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan koordinasi yang efektif. Pengarahan atau

direktif pimpinan unit kerja untuk penekanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dilaksanakan dengan menjalin komunikasi dua arah melalui rapat staf rutin dan berkala agar setiap pejabat atau staf pelaksana dapat secara optimal melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif, saling menggerakkan, berproduktif, serta dapat berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan peraturan yang ada.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tersebut, program / kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah semua Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), antara lain :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Hal tersebut dikarenakan program / kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

A. Beberapa Catatan Atas Kinerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2018

Setelah menilai dan menelaah laporan keuangan dan memperhatikan pencapaian kinerja dari program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, maka terdapat beberapa catatan-catatan atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko yang diuraikan seperti di bawah ini:

1. Output Kegiatan

Berdasarkan kajian dan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2018, ada beberapa kegiatan yang pencapaian *output* belum terlalu menggembirakan. Terutama menyangkut ketersediaan data-data dan dokumen yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Indikator Output kegiatan yang masih terlalu luas, sehingga akan mengalami kesulitan tatkala akan menghitung dan mengukur kinerja secara rinci dan terukur.

2. Serapan Anggaran Kegiatan

Data realisasi keuangan menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan yang serapan anggarannya di bawah 95%. Permasalahan ini sesungguhnya tidak perlu terjadi apabila pengelola kegiatan dapat mengukur rencana target kinerja yang akan dicapai pada saat menyusun anggaran. Kesalahan juga bisa terjadi pada saat eksekusi kegiatan, yang tidak terkoordinasikan secara baik dan sistematis.

3. Akomodasi Anggaran Terhadap Perencanaan Kegiatan

Pencapaian target-target SKPD secara keseluruhan juga terkendala oleh dukungan dana dari TAPD yang dirasakan masih kurang. Ada beberapa kegiatan yang diusulkan, terutama yang bersifat dana dampingan untuk pembiayaan program dari pemerintah pusat dan provinsi tidak terakomodir dalam Struktur Anggaran Dinas Sosial, Tahun Anggaran 2018.

Saat ini Dinas Sosial sangat membutuhkan rehab berat diantaranya meliputi beberapa bagian lantai kantor turun dan pecah, atap kantor bocor dan plafon banyak yang hancur.

4. Inovasi dan Kreatifitas Penyusunan Kegiatan

Permasalahan pada saat penyusunan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi dinas juga terjadi dalam bentuk kegiatan yang diusulkan masih serupa atau memiliki kesamaan bentuk dengan kegiatan pada tahun sebelumnya. Sehingga pada beberapa fokus sasaran dirasakan begitu optimal, tetapi pada sasaran lainnya dirasakan progresnya masih sangat lemah. Sehingga apabila ini dibiarkan akan mengganggu pencapaian kinerja SKPD secara khusus dan pencapaian target perencanaan pembangunan daerah secara umum.

5. Dukungan Personil/Karyawan

Kinerja Dinas Sosial pada tahun 2018 juga dipengaruhi oleh keterbatasan kuantitas dan kualitas karyawan/personil. Kekurangan itu tentu akan mempengaruhi akselerasi pencapaian target anggaran berbasis kinerja, terutama untuk dukungan tenaga teknis dilapangan.

B. Upaya Pemecahan Masalah

Terhadap beberapa catatan atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018, dapat diusulkan beberapa rekomendasi upaya pemecahan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 yang baik dan memuaskan harus senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan. Terhadap kegiatan yang belum optimal harus ada perbaikan mulai dari perencanaan sampai ke eksekusi kegiatan, terutama dalam koordinasi dan konsolidasi tim dalam pelaksanaannya. Pembagian beban kerja harus sudah jelas sebelum kegiatan dimulai "(siapa dan mengerjakan apa)".

2. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisis pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja SKPD harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia. Kualitas data sebagai sumber perencanaan juga sangat penting untuk diperhatikan. Agar perencanaan kegiatan yang telah disusun itu benar-benar dapat menunjang pencapaian visi dan misi SKPD. Koordinasi dan konsultasi diantara bidang-bidang dengan subbag bina program dan kasi anggaran sebagai penanggungjawab urusan perencanaan harus baik, sehingga perencanaan kegiatan benar-benar dapat menjawab kebutuhan SKPD.

3. Alternatif Dukungan Pendanaan dari CSR

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot dan panjang Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan telah disahkan pada tahun 2018. Ini menjadi alternatif solusi terhadap persoalan minimnya alokasi anggaran pada Dinas Sosial untuk tahun berikutnya. SKPD setidaknya sudah memiliki sandaran hukum untuk mencari sumber pendanaan diluar APBN dan APBD untuk membiayai kegiatan yang dibebankan, terutama untuk penanganan PMKS, Pemberdayaan PSKS, dan penanganan sektor ketenagakerjaan.

4. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional dan Profesional

Untuk menumbuhkan dan memotivasi karyawan dalam bekerja perlu diterapkan pemberian “reward dan punishment” secara proporsional. Tentu hal ini bukan hanya Dinas Sosial yang memikirkannya, tetapi sudah waktunya TAPD melakukan terobosan anggaran agar kinerja karyawan itu bisa ditingkatkan.

5. Peningkatan Produktifitas Layanan Sosial

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2018 tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka diperlukan peningkatan produktifitas pada layanan sosial diantaranya sebagai berikut;

1. Perlu adanya Verifikasi data untuk lembaga pelatihan Sosial agar memiliki izin lembaga yang sesuai dengan prosedur
2. Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Peningkatan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

**LAMPIRAN TABEL
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH
DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2018**

TABEL 2
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL TAHUN 2018
BERDASARKAN KEPANGKATAN DAN PENDIDIKAN

GOL.	PENDIDIKAN					JUMLAH
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
IV/c		1				1
IV/b						
IV/a		1		1		2
III/d	1	1		2		4
III/c		1	1			2
III/b		4				4
III/a		2	1			3
II/d				2		2
II/c				1		1
II/b						
II/a				1		1
Kontrak		3				3
TKS		2		5		7
Jumlah	1	14	2	11		29

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TABEL. 3
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN ESELON

NO.	JABATAN	GOL.	ESELON	STAF	JUMLAH
1	Kepala Dinas Sosial	IV/c	II/b		
2	Sekretaris	IV/a	III/a		
3	Kepala Bidang	III/d, IV/a	III/b		
4	Kepala Sub Bagian	III/d, III/b	IV/a		
5	Kasi	III/d, III/d, III/d, III/b, III/b	IV/a		
J U M L A H				-	12

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TABEL. 4

**STRUKTUR ANGGARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.349.093.000,00
1.	Belanja Pegawai	1.349.093.000,00
B.	BELANJA LANGSUNG	3.034.982.000,00
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	571.447.500,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	375.827.300,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.500.000,-
4.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	108.000.000,-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000,-
6.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	926.074.700,-
7.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	458.250.000,-
8.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	440.532.500,-
9.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	56.000.000,-
10.	Program Peningkatan Penanggulangan NAPZA Penyakit Menular Seksual Termasuk HIV/AIDS	35.000.000,-
11.	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	116.350.000,-
12.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000,-

Sumber : Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan

TABEL 5.
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL TAHUN 2018

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Aksebilitas Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemberdayaan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Serta Terjaminnya Kesejahteraan Sosial PMKS	1. Jumlah PMKS sudah tertangani
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan perlindungan sosial sebagai metode penggulangan kemiskinan	1. Meningkatnya mutu keterjangkauan dan profesionalitas penyelenggaraan perlindungan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan	1. Penanggulangan kemiskinan yang bermutu terjangkau dan profesional
3.	Terwujudnya Peran Aktif PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	1. Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	1. Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) dan Jumlah PMKS yang tertangani dengan baik
4.	1. Terwujudnya Jiwa Keperintisan Kesetiakawanan Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	1. Perintis Kemerdekaan Veteran, Janda Pahlawan dan Keluarga yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	1. Jumlah Perintis Kemerdekaan, Veteran, janda pahlawan dan keluarga yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial

Sumber: Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2021

TABEL. 6
PENGUKURAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)					Realisasi		Batas (Unit)	Indikator Kinerja Utama (Out Put)		Target Indikator	Realisasi Indikator
				Pagu Anggaran	Dinas Desentralisasi	Dinas	Total Anggaran	Rencana		Mend. (Kinerja) (Indikator)		Mend. (Kinerja) (Indikator)			
								%	Rp						
I	5.1	Belanja Tidak Langsung	APBD	1.349.093.000	0	0	1.349.093.000	1.330.842.502	99,31	11	11	14	14	14	14
A	5.1.1	Belanja Pegawai	APBD	1.349.093.000			1.349.093.000	1.339.842.502	99,31					100%	100%
	5.1.1.01	1. Gaji dan Tunjangan	APBD	1.349.093.000			1.349.093.000	1.339.842.502	99,31					100%	100%
II	5.2	Belanja Langsung	APBD	3.034.982.000			3.034.982.000	2.877.331.492	94,81						
A	1.06.1.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	APBD	571.447.500			571.447.500	540.588.412	94,60						
	01	1. Penyediaan jasa surat menyurat	APBD	4.200.000			4.200.000	4.200.000	100,00				Standar: Penyediaan jasa surat menyurat	2 surat	2 surat
	02	2. Penyediaan jasa komunikasi, SEIA dan BKR	APBD	33.000.000			33.000.000	29.132.598	88,34				Jumlah Waktu Penyediaan jasa komunikasi SEIA dan BKR	12 Bulan	12 Bulan
	07	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	APBD	85.200.000			85.200.000	76.200.000	89,44				Jumlah Penyerahan jasa administrasi keuangan	11 Orang	11 Orang
	08	4. Penyediaan jasa kecerdasan komputer	APBD	18.000.000			18.000.000	18.000.000	100,00				Jumlah Penyerahan jasa kecerdasan komputer	4 orang	4 orang
	10	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	APBD	30.000.000			30.000.000	29.932.000	99,84				Jumlah penyediaan alat tulis kantor	17 item	17 item
	11	6. Penyediaan barang cetakan dan penggantian	APBD	18.000.000			18.000.000	17.970.000	99,83				Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	4 item	4 item
	12	7. Penyediaan komputer dan instalasi jaringan komputer	APBD	12.000.000			12.000.000	11.516.000	95,97				Jumlah penyediaan komputer instalasi jaringan komputer	6 item	6 item
	13	8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	APBD	6.000.000			6.000.000	6.000.000	100,00				Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 item	13 item
	15	9. Penyediaan bahan bakar dan perawatan kendaraan	APBD	18.960.000			18.960.000	18.793.000	98,94				Jumlah Penyediaan Bahan Bakar dan Perawatan Kendaraan	3 item	3 item
	17	10. Penyediaan makanan dan minuman	APBD	47.187.500			47.187.500	47.062.500	99,78				Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	1 item	1 item
	18	11. Rapat rapat koordinasi dan komunikasi ke luar daerah	APBD	166.400.000			166.400.000	166.320.314	99,95				Jumlah pelaksanaan koordinasi dan komunikasi ke luar daerah	21 kali	21 kali

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)				Realisasi		Materi (Penerapan, Hasil, Sasaran)	Ter capai (Materi)	Berkas (Materi)
				Pagu Anggaran	Dana	Pengeluaran	Dana	Anggaran (Rp)				
								Rp	%			
14	3	Pelayanan Sosial bagi orang tua lanjut dan orang tua lanjut tidak dibayar	APBD	74.600.000				74.600.000	99,03	Jumlah orang tua lanjut dan orang tua lanjut yang menerima pelayanan sosial	60 Orang	60 Orang
15	4	Pengembangan Kemandirian dan Penguatan Pelayanan Luar Negeri Sosial Sosial Kalurahan bagi Orang Tua lanjut dan Tidak Dibayar	APBD	20.000.000				20.000.000	95,00	Jumlah Pengembangan Sosial dan Penguatan Pelayanan Luar Negeri Sosial Sosial Kalurahan bagi Orang Tua lanjut dan Tidak Dibayar	4 Orang	1 Orang
17	5	Pada-sasaran Evaluasi Berbasis Sekolah Kalurahan	APBD	10.000.000				10.000.000	0,00	Evaluasi berbasis sekolah	0	0
18	6	Pengembangan distribusi buffer stock	APBD	90.000.000				90.000.000	94,17	Jumlah penerima bantuan sosial dalam masa tanggap darurat	250 Orang	250 Orang
20	7	Bantuan Pengembang Cekat	APBD	60.000.000				60.000.000	85,66	Jumlah Bantuan Pengembang Cekat	40 Orang	30 Orang
21	8	Pendampingan Anak berkebutuhan khusus Hukum (ABK)	APBD	20.650.000				20.650.000	96,73	Jumlah Pendampingan Anak berkebutuhan khusus Hukum (ABK)	60 Orang	40 Orang
22	9	Pendampingan Rutin	APBD	55.000.000				55.000.000	98,67	Jumlah Pendampingan Rutin	50 KPM	50 KPM
23	10	Pelaksanaan Masalah masalah strategi yang merupakan tanggapan darurat	APBD	50.000.000				50.000.000	94,38	Jumlah Pelaksanaan Masalah masalah strategi yang merupakan tanggapan darurat	3 Kali	2 Kali
E.	1.06.1.06.01.01.19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo		440.532.500				440.532.500	97,31			
07	1	Pembinaan Gedung Panti Asuhan	APBD	440.532.500				440.532.500	97,31	Jumlah pembinaan Gedung Panti Asuhan	1 Kali	1 Kali
F.	1.06.1.06.01.01.21	Program Pemberdayaan Kemandirian Kesejahteraan Sosial		56.000.000				56.000.000	97,46			
05	1	Penguatan Kapasitas Capacity Building Organisasi Sosial dalam Penguatan Masalah Sosial	APBD	25.000.000				25.000.000	97,84	Jumlah penguatan kapasitas Organisasi Sosial dalam Penguatan Masalah Sosial	1 Kali	1 Kali
07	2	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemandirian	APBD	31.000.000				31.000.000	97,16	Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemandirian	8 Kali	6 Kali

No.	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)				Realisasi		Tambahan (Unit)	Indikator Kinerja Kehutanan (Out Put)		Target Indikator	Maksimal Indikator
				Pagu Anggaran	Dana Dampungan	Dana Penunjan	Total Anggaran	Kerangka			Sarana (Sediaan dan Angkutan)			
								Rp	%					
B.	1.06.1.06.01.01.23	Program Peningkatan Penguasaan NAPZA Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS	APBD	35.000.000			35.000.000	35.000.000	100,00					
	01	Sosialisasi, Deteksi Dini 1. NAPZA dan HIV/AIDS	APBD	35.000.000			35.000.000	35.000.000	100,00			Jumlah peserta sosialisasi deteksi dini NAPZA dan HIV/AIDS	400 Orang	400 Orang
	1.06.06.01.24	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	APBD	116.350.000			116.350.000	115.583.000	99,34					
	01	Pelatihan ketrampilan bagi 1. keluarga miskin	APBD	35.000.000			35.000.000	35.000.000	100,00			Jumlah pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin	30 Orang	30 Orang
	02	Pembinaan kelompok Usaha 2. Bersama (KUBE)	APBD	38.600.000			38.600.000	37.953.000	98,32			Jumlah kelompok Usaha Bersama (KUBE)	30 KUBE	30 KUBE
	03	Pembinaan Program 3. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terbakut (ASLU/T)	APBD	18.250.000			18.250.000	18.210.000	99,78			Jumlah Lanjut Usia Terbakut yang menerima program (ASLU/T)	73 Orang	73 Orang
	04	Pembinaan Program 3. Asistensi Sosial Penyandang Cacat Berat	APBD	24.500.000			24.500.000	24.420.000	99,67			Jumlah penyandang cacat berat yang menerima Program Asistensi Sosial Penyandang Cacat Berat	10 Orang	10 Orang
1.	1.06.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	APBD	15.000.000			15.000.000	14.920.000	99,47					
15	1	Penyusunan Rencana Kerja dan Kerja Perbaikan	APBD	15.000.000			15.000.000	14.920.000	99,47			Jumlah indikator penyusunan rencana, kerja, dan kerja perbaikan	8 Dokumen	8 Dokumen

**EVALUASI ANALISIS KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	SO. BERKESKIN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARJADAT	PAJAK	REKORDASI PADA 2018	REALISASI TAMBAH
				5	6				
1	1.06.06.01.01	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang prima dan memuaskan masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah		100%	571.447.500	540.588.412	94,60%
1	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input Output Outcome	Jumlah Data Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat Realisasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000 1000 Lembar 500 Lembar Materi 5000, 500 Lembar Materi 3000,	4.500.000	1.500.000	100,00%
2	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input Output Outcome	Jumlah data Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Bekas Tepon, Bekas Listrik, Bekas Kawat/Pasangan/Internet/TV/Handel/TV satelit	33.000.000 12 Bulan 12 Bulan	33.000.000	29.150.596	88,34%
3	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input Output Outcome	Jumlah Data Jumlah Pemberian jasa administrasi keuangan Realisasi penyediaan jasa administrasi keuangan	85.200.000 12 Orang 7 orang pengelola keuangan daerah, 1 orang pejabat pengada barang dan jasa, 4 orang Pengelola Simba Keuangan	85.200.000	76.200.000	89,44%
4	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input Output Outcome	Jumlah Data Jumlah Pemberian jasa kebersihan kantor Cleaning Service	18.000.000 8 orang 2 orang	18.000.000	18.000.000	100,00%
5	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input Output Outcome	Jumlah Data Jumlah penyediaan alat tulis kantor Realisasi Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000 17 Bulan 8.000	30.000.000	29.850.000	99,50%
6	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input Output Outcome	Jumlah Data Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Realisasi Penyediaan Barang Cetakan (Realisasi) Penyediaan Barang Penggandaan	18.000.000 1 Bulan 22 Sampul/Blok/Pak 50.200 Lembar	18.000.000	17.470.000	97,00%

NO	NO. REKRENO	SARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KUALITAS	TARGET	WAKTU	KUALIFIKASI MANUSIA	REALISASI TARGET
7	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Realisasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000 6.000.000 6.000.000	6 Jenis 388 Buah/Rol	11.215.000 6.000.000 100,00%
8	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Realisasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.940.000 18.940.000 18.940.000	13 Jenis 203 Buah	10.791.000 18.940.000 56,94%
9	15		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan Realisasi Penyediaan bahan baku dan peraturan perundang-undangan	47.187.500 47.187.500 47.187.500	12 Media dan 1 Tabloid 1 Jenis 3.770 Kotak	47.082.500 47.187.500 99,78%
10	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Penyediaan makanan dan minuman Realisasi Penyediaan makanan dan minuman	166.400.000 166.400.000 166.400.000	29 Kali 10 Kali Rezeki 11, 5 Kali Golongan IV/Eselon IV, 11 Kali Golongan II, 3 Kali Golongan 1 dan II	166.320.314 166.400.000 99,95%
11	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	28.000.000 28.000.000 28.000.000	104 Kali 20 Kali Eselon 1, 22 Kali Golongan IV/Eselon IV, 62 Kali Golongan III, 20 Kali Golongan II	23.000.000 28.000.000 85,36%
12	19		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	104.200.000 104.200.000 104.200.000	14 Orang 3 Orang Imaga, 1 orang daerah Pdk, 2 orang supir, 2 Orang Pratama, 2 orang sekam, 3 orang pengelola TEPIKA OFD	99.200.000 104.200.000 95,20%
13	21		Penyediaan Jasa Kantor	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah pembelian jasa kantor Realisasi penyediaan jasa kantor	99.200.000 99.200.000 99.200.000		

NO	NO. REKRENSI	SARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDUKTOR KINERJA	TARGET	KUANTITAS	WALUAS	WALUAS
II	1.06.06.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang prima dan memuaskan masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	375.827.300	366.120.626	97,43%
1	09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 2 Unit Laptop, 1 Unit Komputer PC, 2 Unit Air Conditioner (AC), 1 Unit Proyektor	53.027.300 6 Unit	53.027.300	99,44%
2	10		Pengadaan Meubeler	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah pengadaan Meubeler Kantor Bebanasi Pengadaan Meubeler	9.000.000 18 Unit	9.000.000	100,00%
3	22		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Upah Tukang, Kayu, Pagar, Kawat Berduri, Paku	20.000.000 3 Unit 194	20.000.000	100,00%
4	24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan bermotor roda 5, Kendaraan bermotor roda 4, Kendaraan bermotor roda 2	81.800.000 1 Jenis 1 Unit kendaraan Roda 5, 2 Unit kendaraan Roda 4 dan 9 Unit kendaraan Roda 2	81.800.000	92,91%
5	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Service Laptop, Service Printer, Service Komputer	13.000.000 10 Unit	13.000.000	100,00%
6	45		Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung Kantor	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Dana Jumlah Dana	200.000.000 1 Unit 1 Unit	200.000.000	98,19%
III	1.06.06.01.05	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi	31 Orang	25.500.000	25.489.900	99,96%

NO	NO. RENCANA	SARAN STRATEGIS	PROGRAM / KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAHIL	REKORASIN PAHIL	REKORASIN TARGET
1	2.1		Program Kurikulum Keluarga Lainnya	Input: Jumlah dana Output: Jumlah pegawai yang mengikuti kursus-kursus lainnya Outcome: Pegawai yang mengikuti kursus-kursus lainnya	34.000.000 3 Orang 3 Orang	23.500.000	45.300.000	19.342%
IV	1.06.06.01.16	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Input: Jumlah Dana Output: Jumlah Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Outcome: Memajukan Kesejahteraan Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	5,28%	458.250.000	427.016.496	93,18%
2	13		Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Input: Jumlah Dana Output: Jumlah Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Outcome: Memajukan Kesejahteraan Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	34.000.000 1 kali 13 Orang	34.000.000	33.025.000	97,13%
3	14		Sosialisasi Parenting Skill bagi Keluarga Lanjut Usia terlantar	Input: Jumlah Dana Output: Jumlah Peserta Sosialisasi Parenting skill bagi keluarga lanjut usia Outcome: Peningkatan kecakapan keluarga lanjut usia	35.000.000 1 kali 75 Orang	35.000.000	34.810.000	99,46%
4	16		Pelayanan Sosial bagi orang terlantar dan orang tidak dikenal	Input: Jumlah Dana Output: Jumlah orang terlantar dan orang tidak dikenal yang mendapatkan pelayanan sosial Outcome: Jumlah dukungan pelayanan sosial terhadap orang terlantar dan orang tidak dikenal	74.600.000 25 Orang 25 Orang	74.600.000	73.890.000	99,05%
5	17		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Panti Sosial Skala Kabupaten bagi Orang Terlantar dan Tidak Dikenal	Input: Jumlah Dana Output: Pembelian Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Panti Sosial Skala Kabupaten bagi Orang Terlantar dan Orang Tidak Dikenal Outcome: Jumlah sarana dan prasarana pelayanan luar panti sosial skala kabupaten bagi orang terlantar dan tidak dikenal	20.000.000 1 Unit 1 Unit	20.000.000	19.000.000	95,00%
6	18		Pelaksanaan Evaluasi Bencana Skala Kabupaten	Input: Jumlah Dana Output: Evaluasi bencana skala kabupaten Outcome: Jumlah Evaluasi bencana skala kabupaten	10.000.000 3 kali 500 Orang	10.000.000	0	0%
7	19		Pengembangan distribusi buffer stock	Input: Jumlah Dana Output: Jumlah penerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Outcome: Jumlah dokumen pengalokasian distribusi buffer stock	90.000.000 300 Orang 1 Dokumen	90.000.000	84.754.360	94,17%
8	20		Bantuan Penyandang Cacat	Input: Jumlah Dana Output: Jumlah Penyandang Cacat Berat yang mendapatkan bantuan Outcome: Memajukan kesejahteraan bagi penyandang cacat berat	60.000.000 45 Unit 45 Orang	60.000.000	51.356.335	85,58%

NO.	NO. REKRENSI	BAKORAN STRATEGIS	PROGABAS/PELOKAT	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAJAK	WAKTU	PERKIRAAN
				Jumlah Anak berkebutuhan khusus (ABH)	24.529.000	30.000.000	30.000.000	96,73%
				Pendampingan Anak berkebutuhan khusus dengan Hukum (ABH)	10 orang			
				Output	10 orang			
				Outcome	10 orang			
				Input	35.000.000	55.000.000	54.270.000	98,67%
				Output	4 Kecamatan			
				Outcome	50 KM			
				Input	50.000.000	50.000.000	47.190.000	94,38%
				Output	3 Kali			
				Outcome	3 Jenis			
				Input	100%	440.332.500	428.230.000	97,21%
				Output	1 Unit			
				Outcome	1 Unit			
				Input	440.332.500	440.332.500	428.230.000	97,21%
				Output	1 Unit			
				Outcome	1 Unit			
				Input	50.000.000	56.000.000	54.580.000	97,46%
				Output	50 Orang			
				Outcome	25.000.000	25.000.000	24.160.000	97,94%
				Input	1 Kali			
				Output	30 Orang			
				Outcome	30 Orang			

NO	NO. REKRENSI	SARAS STRATEGIS	PROGRAM/REGISTRASI	INISIASI KINERJA	TARGET	WAKTU	REALISASI	WAKTU	REALISASI
1	01		Peningkatan dan Penguatan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Input Output Outcome	33 Orang 6 Kali 15 Orang	31.000.000 31.000.000 31.000.000	31.000.000 31.000.000 31.000.000	31.000.000 31.000.000 31.000.000	31.000.000 31.000.000 31.000.000
VI	1.06.06.01.22	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Input Output Outcome	61,36% 100% 15 Orang	926.074.700 854.843.009 25.645.000	854.843.009 25.645.000 25.645.000	854.843.009 25.645.000 25.645.000	92,31% 91,39% 91,39%
1	01		Peningkatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Tenaga dan Peningkatan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Input Output Outcome	28.000.000 1 Kali 30 Orang	28.000.000 85.337.500 85.337.500	28.000.000 85.337.500 85.337.500	28.000.000 85.337.500 85.337.500	91,39% 91,39% 91,39%
1	01		Peningkatan Kapasitas Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan	Input Output Outcome	21 Orang 1 Kali 30 Orang	21.000.000 85.337.500 85.337.500	21.000.000 85.337.500 85.337.500	21.000.000 85.337.500 85.337.500	91,39% 91,39% 91,39%
2	03		Peningkatan Kemampuan dan kapasitas Karang taruna	Input Output Outcome	35 Karang Taruna 76 Orang 53.000.000	35.000.000 76.109.738 53.000.000	35.000.000 76.109.738 53.000.000	35.000.000 76.109.738 53.000.000	91,39% 91,39% 91,39%
3	05		Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Pekerja Sosial masyarakat (PSM)	Input Output Outcome	1 Kali 150 Orang 24.000.000	24.000.000 24.000.000 24.000.000	24.000.000 24.000.000 24.000.000	24.000.000 24.000.000 24.000.000	91,39% 91,39% 91,39%
3	05		Pembentukan Organisasi Sosial	Input Output Outcome	5 Orang 5 Orang 5 Orang	5.000.000 5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000 5.000.000	91,39% 91,39% 91,39%

No	Kode	Kategori	Indikator	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama			Target			Realisasi		
					Input	Output	Outcome	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4				Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
6		08		Penyuluhan Beras Keadilan Sosial (PAKSA)	Jumlah Beras	Jumlah Beras yang mengikuti pelatihan	Jumlah Beras yang mengikuti pelatihan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang
7		10		Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
7		10		Seusi Pembangunan Keluarga (Family Development Session)	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
VII	1.06.06.01.13			Program Peningkatan Penguasaan NAWA Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang
I		01		Sosialisasi Endeksi Dini NAWA dan HIV/AIDS	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
VIII	1.06.06.01.24			Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%
I		02		Pelatihan Keterampilan bagi keluarga miskin	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	Jumlah Disabilitas yang mengikuti pelatihan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000

TABEL.8

**PAGU DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
DINAS SOSIAL TAHUN 2018**

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BELANJA	1.035.575.000,00	1.031.544.890,00	99,61 %
	Belanja Tidak Langsung	1.035.575.000,00	1.031.544.890,00	99,61 %
	Belanja Pegawai	1.035.575.000,00	1.031.544.890,00	99,61 %
	Gaji dan Tunjangan	1.035.575.000,00	1.031.544.890,00	99,61 %
1.	Gaji Pokok/ Uang Representasi	1.035.575.000,00	1.031.544.890,00	94,56
2.	Tunjangan Keluarga	90.000.000,00	88.794.596,00	98,66%
3.	Tunjangan Jabatan	134.000.000,00	133.370.000,00	99,09%
4.	Tunjangan Fungsional Umum	29.000.000,00	27.865.000,00	96,09%
5.	Tunjangan Beras	55.000.000,00	53.301.120,00	96,91%
6.	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	5.500.000,00	4.952.062,00	90,04%
7.	Pembulatan Gaji	18.000.00	14.834,00	82,41%

TABEL 9
PAGU REALISASI BELANJA LANGSUNG
DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI TARGET	PAGU	REALISASI PAGU	REK
1	BELANJA	3	4	5	6	7	8
	Belanja Langsung		100%	95,04%			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah	Rp 3.239.400.000		Rp 3.034.982.000	Rp 2.877.331.492	
1	Penyediaan jasa surat menyurat		100%	94,60%	571.447.500	540.588.412	
2	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik		4.500.000	100,00%	4.500.000	4.500.000	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan		33.000.000	88,34%	33.000.000	29.152.598	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor		85.200.000	89,44%	85.200.000	76.200.000	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		18.000.000	100,00%	18.000.000	18.000.000	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		30.000.000	99,84%	30.000.000	29.952.000	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		18.000.000	99,83%	18.000.000	17.970.000	
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12.000.000	95,97%	12.000.000	11.516.000	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per- UU an		6.000.000	100,00%	6.000.000	6.000.000	
10	Penyediaan makanan dan minuman		18.960.000	56,94%	18.960.000	10.795.000	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		47.187.500	99,78%	47.187.500	47.082.500	
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		166.400.000	99,95%	166.400.000	166.330.314	
13	Penyediaan Jasa Kantor		28.000.000	85,35%	28.000.000	23.933.000	
			104.200.000	95,20%	104.200.000	99.200.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI TARGET	9 JAN 2023
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	97,42%	375.827.3000
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Dana	53.027.300	59,44%	53.027.300
2	Pengadaan Meubeler	Jumlah Dana	9.000.000	100,00%	9.000.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Dana	20.000.000	100,00%	20.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Dana	81.800.000	92,91%	81.800.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Dana	12.000.000	100,00%	12.000.000
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Dana	200.000.000	98,19%	200.000.000
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Penambahan Kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi	31 Orang	99,84%	25.500.000
1	Kegiatan Kursus-Kursus Lainnya		25.000.000	99,84%	25.500.000
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Dokumen		
	Predikat SAKIP		OC	100,00%	15.000.000
1.	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Jumlah Dana	5.000.000	100,00%	5.000.000
2.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dana	10.000.000	100,00%	10.000.000
E. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Jumlah PMKS yang dibina, direhab dan dilayani (orang)	450 Orang		
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%		427.016.493

PROGRAM / KEGIATAN		REKAPITULASI PERENCANAAN		PENCAPAIAN		TAMBAHAN	
NO	PROGRAM / KEGIATAN	Jumlah Dana	31.000.000	97,13%	34.000.000	95,15%	35.175.000
1	Pelatihan Keterampilan bagi Pemangku Rawa Sosial Ekonomi (PRIS)	Jumlah Dana					
2	Sosialisai Parenting Skill bagi Keluarga Lanjut Usia terlarut	Jumlah Dana	35.000.000	99,46%	35.000.000		34.810.000
3	Pelayanan Sosial bagi orang terlarut dan orang tidak dikenal	Jumlah Dana	74.600.000	99,05%	74.600.000		73.890.000
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Luar Panti Sosial Sikala Kabupaten bagi Orang Terlarut dan Tidak Dikenal	Jumlah Dana	20.000.000	95,00%	20.000.000		19.000.000
5	Pelaksanaan Evakuasi Bencana Skala Kabupaten	Jumlah Dana	10.000.000	0,00%	10.000.000		0
6	Penyelenggaraan distribusi buffer stock	Jumlah Dana	90.000.000	94,17%	90.000.000		84.754.960
7	Bantuan Penyandang Cacat	Jumlah Dana	60.000.000	85,66%	60.000.000		51.396.335
8	Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah Dana	29.650.000	96,73%	29.650.000		28.680.000
9	Pendampingan Pembangunan Rutlishu	Jumlah Dana	55.000.000	98,67%	55.000.000		54.270.000
10	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyurutkan Tanggapi Darurat	Jumlah Dana	50.000.000	94,38%	50.000.000		47.100.000
F.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	97,21	440.532.500		428.320.000
1	Pembangunan Gedung Panti Sosial I	Jumlah Dana	440.532.500	97,21	440.532.500		428.320.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI TARGET	PACU	REALISASI PACU	KEY
1	2	3	4	5	6	7	8
G.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase warga masyarakat yang menjadi dan berpartisipasi dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial	0,90%				
		Jumlah kalangan dunia usaha dan masyarakat yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial	50 Orang	97,46	56.000.000	54.580.000	
		Jumlah Dana	25.000.000		25.000.000	24.460.000	
1	Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Organisasi Sosial dalam Penanganan Masalah Sosial	Jumlah Dana	31.000.000	97,16%	31.000.000	30.120.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Dana					
H.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	61,36%	92,31%	926.074.700	854.843.059	
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%				
		Jumlah Dana	28.000.000	91,59%	28.000.000	25.645.000	
1	Penyuluhan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Jumlah Dana	85.337.500	88,01%	85.337.500	75.109.738	
2	Peningkatan Kapasitas Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan	Jumlah Dana	32.000.000	99,84%	32.000.000	31.950.000	
3	Pembinaan Kelembagaan dan kapasitas karang taruna	Jumlah Dana	53.000.000	97,83%	53.000.000	51.850.000	
4	Dibangun Teknis Peningkatan Kualitas SDM Pekerja Sosial masyarakat (PSM)	Jumlah Dana	24.000.000	97,67%	24.000.000	23.440.000	
5	Pembentukan Organisasi Sosial	Jumlah Dana	38.000.000	90,79%	38.000.000	37.920.000	
6	Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat	Jumlah Dana	575.205.000	90,53%	575.205.000	520.730.321	
7	Penyaluran Beras Kesejahteraan Keluarga (RASTRA)	Jumlah Dana	35.000.000	97,84%	35.000.000	34.245.000	
8	Pelatihan Ketrampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Dana					

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PENCAPAIAN TARGET	PAJAK	REALISASI PAJAK	KEC
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Seri Pendidikan Anak-anak (Pendidikan Dasar)	Jumlah Dana	55.521.000	100,15%	55.522.200	55.522.200	
1.	Program Peningkatan Penanggulangan NAPZA Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS	Jumlah siswa/pelajar yang diberikan sosialisasi tentang NAPZA, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS	400 Orang	100,00%	35.000.000	35.000.000	
1	Diseminasi Dampak Diri NAPZA dan HIV/AIDS	Jumlah Dana	35.000.000	100,00%	35.000.000	35.000.000	
10.	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK)	800 KK	99,34%	116.390.000	115.583.000	
1	Pelatihan Ketrampilan bagi keluarga miskin	Jumlah Dana	35.000.000	89,57%	35.000.000	35.000.000	
12	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah Dana	38.600.000	98,32%	38.600.000	37.952.000	
3	Pembinaan Program Asistensi Sosial Lanjut Data Terlarut (ASLU)	Jumlah Dana	18.250.000	99,78%	18.250.000	18.210.000	
4	Pembinaan Program Asistensi Sosial Penyandang Cacat Berat	Jumlah Dana	24.500.000	99,67%	24.500.000	24.420.000	
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan Tepat Waktu	100,00%	99,47%	15.000.000	14.920.000	
1	Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan	Jumlah Dana	15.000.000	99,47%	15.000.000	14.920.000	

Sumber : Sub-Bagian Perencanaan dan Keuangan.